

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga;
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor.07 Tahun 2011 tgl. 3 Januari 2011 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
8. Surat Edaran Mendagri No. 120/313/OTDA tanggal 24 Januari 2011 Perihal Penyusunan LPPD tahun 2010 dan Surat edaran Mendagri No. 120.04./7303/OTDA tgl. 26 Desember 2012 tentang Pedoman Penyusunan LPPD tahun 2012;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga.

B. GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DINKOMINFO) KABUPATEN PURBALINGGA

1. **Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinkominfo**
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris
 - 1) Kasubag. Perencanaan dan Keuangan
 - 2) Kasubag. Umum dan Kepegawaian
 - c. Kepala Bidang Sandi, Statistik dan Telekomunikasi
 - 1) Kepala Seksi Sandi
 - 2) Kepala Seksi Statistik
 - 3) Kepala Seksi Telekomunikasi

- d. Kepala Bidang Humas
 - 1) Kepala Seksi Kehumasan
 - 2) Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Publik
- e. Kepala Bidang Komunikasi, Informatika dan Telematika
 - 1) Kepala Seksi Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi
 - 2) Kepala Seksi Pos Telekomunikasi dan Aplikasi Telematika

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga pada Bab. II pasal 2 menyebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, merupakan unsur pelaksana unsur Pemerintah bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kemudian dalam BAB III pasal 4 disebutkan tugas Dinkominfo adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan Daerah Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinkominfo mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Humas dan Informasi Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi ;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Humas dan Informasi Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Humas dan Informasi Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Humas dan Informasi Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi;
5. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
6. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
7. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

3. Kepegawaian

Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) sebagai dinas teknis dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia baik yang berstatus sebagai PNS maupun Pegawai Tidak Tetap, sebagai rincian kondisi kepegawaian Dinkominfo tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Pegawai** : **58 (lima puluh delapan) orang**
Pegawai Negeri Sipil : 38 (tiga puluh delapan) orang
PTT SK. Bupati : - orang
PTT SK. Kepala Dinas : 20 (dua puluh) orang
- b. PNS Berdasarkan Pendidikan**
S2 : 4 (empat) orang
S1 : 26 (dua puluh enam) orang
Diploma III : 3 (dua) orang
Diploma II : - orang
SLTA : 24 (dua puluh lempat) orang
SLTP : 1 (satu) orang
SD : - orang
J u m l a h : **58 (lima puluh delapan) orang**
- c. PNS Berdasarkan Golongan**
Golongan IV : 5 (lima) orang
Golongan III : 21 (dua puluh satu) orang
Golongan II : 12 (dua belas) orang
Golongan I : - orang
J u m l a h : **38 (tiga puluh delapan) orang**
- d. PNS Berdasarkan Jenis kelamin**
Laki-laki : 44 (empat puluh empat) orang
Perempuan : 14 (empat belas) orang
Jumlah : **58 (lima puluh delapan) orang**

e. Pembagian Pesonil

NO.	BIDANG/UNIT	PNS/CPNS	NON PNS (PTT)
1	Kepala Dinas	1	
1	SEKRETARIAT	10	1
2	BIDANG SANDI, STATISTIK DAN TELEKOMUNIKASI	12	1
3	BIDANG HUMAS DAN IKP	8	15

4	BIDANG INFORAMTIKA	7	3
JUMLAH		38	20

Lebih lengkap mengenai kondisi kepegawaian Dinkominfo diuraikan dalam Daftar Urut Kepangkatan (DUK) sebagaimana terlampir.

4. Sarana Dan Prasarana Kantor

a. Prasarana Infrastruktur Gedung pada Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- 1) Gedung Kantor Dinas
- 2) Gedung LPPL Radio Gema Soedirman
- 3) Gedung Santel
- 4) Gedung Sekretariat LPSE

b. Daftar Asset

- 1) Tanah : Rp. 367.602.000,-
- 2) Peralatan dan mesin : Rp. 3.463.250.349,-
- 3) Gedung dan Bangunan : Rp. 1.024.624.000,-
- 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan : Rp. 16.589.900,-

Secara keseluruhan asset yang dikelola Dinkominfo terdiri dari KIB A – D senilai Rp. 4.504.464.249,- (Empat milyar lima ratus empat juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah)

5. Kondisi Ekonomi

Percepatan pembangunan infrastruktur termasuk didalamnya pembangunan sarana komunikasi dan informatika dilakukan untuk mendukung penguatan konektivitas di dalam wilayah. Melalui penguatan konektivitas antar wilayah dan di dalam wilayah itu sendiri diharapkan akan menurunkan biaya transportasi barang dan jasa khususnya ke wilayah-wilayah yang berada jauh dari lokus produksi barang yang nantinya akan menguntungkan para pelaku usaha (produsen) dan masyarakat (konsumen). Adapun fasilitas Dinkominfo yang mendukung kegiatan ekonomi, yaitu :

5.1. Fasilitas Komunikasi dan Informatika :

- a. Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Gema Soedirman–96.3 FM
- b. Jaringan Internet pada OPD yang terkoneksi dengan Dinkominfo Purbalingga adalah sebagai berikut :

1. *Sistem Pendataan Pendidikan Dasar*
 2. *SIMDA*
 3. *SIMDA ASET*
 4. *SIPKD*
 5. *SIMBADA*
 6. *SIMGAJI*
 7. *SISMIOP*
 8. *SIMPADA*
 9. *SIM-NUPTK*
 10. *BIOS*
 11. *BOS KITA*
 12. *SOP Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Profil Sekolah*
 13. *SIM Dapodik*
 14. *Emis dan Trims*
 15. *Aplikasi Laboratorium Bahasa*
 16. *Sistem Informasi Pembelajaran*
 17. *Aplikasi Biosystem Ver 3.8*
 18. *Aplikasi Software Pembelajaran*
 19. *Sistem Informasi Kesehatan*
 20. *Sistem Informasi Pelayanan Rumah Sakit*
 21. *Sistem Informasi Kepegawaian*
 22. *Sistem Informasi Manajemen Apotik*
 23. *Sistem Surat Elektronik*
 24. *Sistem Informasi Administrasi Kependudukan*
 25. *Program Aplikasi Informasi*
 26. *Sistem Penyusunan Data UMKM*
 27. *Sistem Informasi Perizinan*
 28. *SIMWAS (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan)*
 29. *SIPTL (Pengelolaan Pemantauan Pelaporan TLRHP BPK-RI)*
 30. *SIMHP*
 31. *SI AK*
 32. *e-Kepegawaian*
- c. Untuk layanan komunikasi data tersedia melalui website : purbalinggakab.go.id dan mempunyai 28 sub domain di masing-masing OPD, yaitu :
1. *WWW. bupati.purbalinggakab.go.id*
 2. *WWW. wabup.purbalinggakab.go.id*

3. [WWW. bapem.purbalingga.go.id](http://WWW.bapem.purbalingga.go.id)
4. [WWW. bakeuda.purbalinggakab.go.id](http://WWW.bakeuda.purbalinggakab.go.id)
5. [WWW. dinporapar.purbalinggakab.go.id](http://WWW.dinporapar.purbalinggakab.go.id)
6. [WWW. dindikbud.purbalinggakab.go.id](http://WWW.dindikbud.purbalinggakab.go.id)
7. [WWW. dinkes.purbalinggakab.go.id](http://WWW.dinkes.purbalinggakab.go.id)
8. [WWW. dinpertan.purbalinggakab.go.id](http://WWW.dinpertan.purbalinggakab.go.id)
9. [WWW. dkpp.purbalinggakab.go.id](http://WWW.dkpp.purbalinggakab.go.id)
10. [WWW. dinpendukcapil.purbalinggakab.go.id](http://WWW.dinpendukcapil.purbalinggakab.go.id)
11. [WWW. dpupr.purbalinggakab.go.id](http://WWW.dpupr.purbalinggakab.go.id)
12. [WWW. dinhub.purbalinggakab.go.id](http://WWW.dinhub.purbalinggakab.go.id)
13. [WWW. bapelitbangda.purbalinggakab.go.id](http://WWW.bapelitbangda.purbalinggakab.go.id)
14. [WWW. dinperindag.purbalinggakab.go.id](http://WWW.dinperindag.purbalinggakab.go.id)
15. [WWW. dinpermasdes.purbalinggakab.go.id](http://WWW.dinpermasdes.purbalinggakab.go.id)
16. [WWW. Dinsosdaldukkbp3a.purbalinggakab.go.id](http://WWW.Dinsosdaldukkbp3a.purbalinggakab.go.id)
17. [WWW. bkppd.purbalinggakab.go.id](http://WWW.bkppd.purbalinggakab.go.id)
18. [WWW. bpbd.purbalinggakab.go.id](http://WWW.bpbd.purbalinggakab.go.id)
19. [WWW. dlh.purbalinggakab.go.id](http://WWW.dlh.purbalinggakab.go.id)
20. [WWW. dinarspus.purbalinggakab.go.id](http://WWW.dinarspus.purbalinggakab.go.id)
21. [WWW. dpmpstsp.purbalinggakab.go.id](http://WWW.dpmpstsp.purbalinggakab.go.id)
22. [WWW. rsud.purbalinggakab.go.id](http://WWW.rsud.purbalinggakab.go.id)
23. [WWW. plid.purbalinggakab.go.id](http://WWW.plid.purbalinggakab.go.id)
24. [WWW. jdih.purbalinggakab.go.id](http://WWW.jdih.purbalinggakab.go.id)
25. [WWW. satpolpp.purbalinggakab.go.id](http://WWW.satpolpp.purbalinggakab.go.id)
26. [WWW. sekretariatdprd.purbalinggakab.go.id](http://WWW.sekretariatdprd.purbalinggakab.go.id)
27. [WWW. dinsos.purbalinggakab.go.id](http://WWW.dinsos.purbalinggakab.go.id)
28. [WWW. pkk.purbalinggakab.go.id](http://WWW.pkk.purbalinggakab.go.id)
29. [WWW. dinkopukm.purbalinggakab.go.id](http://WWW.dinkopukm.purbalinggakab.go.id)
30. [WWW. Dinrumkin.purbalinggakab.go.id](http://WWW.Dinrumkin.purbalinggakab.go.id)
31. [WWW. Kecamatanbobotsari.purbalinggakab.go.id](http://WWW.Kecamatanbobotsari.purbalinggakab.go.id)
32. [WWW. Kecamatankutasari.purbalinggakab.go.id](http://WWW.Kecamatankutasari.purbalinggakab.go.id)
33. [WWW. Inspektorat.purbalinggakab.go.id](http://WWW.Inspektorat.purbalinggakab.go.id)

- a. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Sesuai dengan Perpres. No.4 Tahun 2015 Perubahan ke 4 atas
Perpres. No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah, maka di Kabupaten Purbalingga untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah di lakukan melalui LPSE, yaitu

- i. Pengadaan barang pemerintah dengan anggaran lebih dari Rp. 200.000.000,-
 - ii. Pengadaan Jasa Konsultan dengan anggaran lebih dari Rp. 50.000.000,-
- b. Layanan dan Pengolahan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Sejalan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diberlakukan sejak tanggal 30 April 2010 dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka salah satu konsekuensinya adalah dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 550/273 Tahun 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola dan Sekretariat PPID, serta PPID Pembantu pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga, yang diperbaharui dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/106 Tahun 2014 tentang Penetapan PPID , PPID Pembantu dan Sekretariat PPID pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Sebagai landasan opsional PPID Kabupaten Purbalingga telah ditetapkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Layanan permohonan informasi secara langsung/ melalui tatap muka dapat dilayani melalui Sekretariat PPID di Dinkominfo Kabupaten Purbalingga Jl. Letkol Isdiman No 5 Purbalingga sedangkan layanan permohonan secara online dapat dialamatkan ke ppid@purbalinggakab.go.id dan sebagai media layanan informasi publik oleh PPID telah disusun sub domain dengan alamat ppid.purbalinggakab.go.id

BAB II

KEBIJAKAN DINKOMINFO

A. VISI

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu dinas daerah yang merupakan satu kesatuan sistem pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sudah barang tentu mempunyai tanggung jawab untuk terwujudnya visi daerah, dalam rangka turut berperan serta mewujudkan visi Kabupaten Purbalingga.

Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021 adalah **“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”**.

Purbalingga yang Mandiri adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan.

Purbalingga yang Berdaya Saing adalah Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dan persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan

global yang semakin berat, yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.

Purbalingga yang Sejahtera adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.

Maksud dari Berakhlak Mulia adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, telah pula disusun Tujuh Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan, dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan.

B. MISI :

Misi yang berkaitan dengan tugas Dinkominfo, terdapat pada dua misi, yakni Misi 1 : *Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.*

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-1 tersebut adalah : Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat, dengan Sasaran Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Daerah. Salah satu fungsi Dinkominfo yang berkaitan dengan misi ini yakni urusan persandian.

Misi lain yang berkaitan dengan tugas Dinkominfo adalah misi ke-6 : Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan

masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana wilayahan yang memadai. Salah satu tujuan misi ini yang berkaitan dengan fungsi Dinkominfo adalah : Meningkatkan Kualitas dan Keterbukaan Informasi Publik, dengan sasaran Meningkatnya Implementasi e-Government dan Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk mewujudkan misi sebagaimana tersebut diatas, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Kualitas dan Keterbukaan Informasi Publik, dengan sasaran Meningkatnya Implementasi e-Government dan Keterbukaan Informasi Publik.
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana persandian
- 3) Menyediakan data dan informasi pembangunan yang *reliable* dan *up to date*.

Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan keterbukaan informasi publik
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana persandian
3. Meningkatkan kualitas SDM di bidang komunikasi dan informatika;
4. Meningkatkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat;
5. Meningkatkan kelancaran akses jaringan TIK di Kabupaten Purbalingga.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM DINKOMINFO

Urusan Komunikasi dan Informatika

Arah kebijakan pembangunan Sub sektor komunikasi dan Informatika diarahkan untuk :

1. Meningkatkan fasilitas layanan Komunikasi dan Informatika bagi masyarakat guna mempermudah dan mempercepat komunikasi dan penyebaran informasi.
2. Meningkatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka **e-Government** di Kabupaten Purbalingga
3. Optimalisasi kualitas pelayanan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK.)

4. Peningkatan pemberdayaan stakeholder lain (masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha) dalam implementasi teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Arah dari kebijakan sub sektor ini dimaksudkan untuk mendukung aktifitas sektor lain khususnya dibidang pendidikan dan perekonomian rakyat yang semakin meningkat sehingga meningkat pula partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

D. Prioritas Dinkominfo

Dinas Komunikasi dan Informatika memprioritaskan pembangunan yang diwujudkan dalam Program – program kegiatan yang terdiri 5 (lima) Program sebagai berikut :

1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
2. Program Pengelolaan Persandian;
3. Program Pengembangan Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi;
4. Program Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
5. Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik

1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan bahan dan jasa perkantoran
- b. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
- c. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
- d. Pengadaan sarana dan prasarana kantor
- e. Pendidikan dan pelatihan pegawai
- f. Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja

2. Program Pengelolaan Persandian

- a. Pengadaan dan Pemeliharaan Sandi dan Telekomunikasi

3. Program Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi

- a. Pemeliharaan Website dan Jaringan Internet.
- b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Teknologi Informasi Terintegrasi.
- c. Teleconference, SMS Center dan Paper Less Office
- d. Pengadaan dan Pemeliharaan Perangkat LPSE

4. Program Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah

- a. Penyusunan Data Dasar dan Informasi Pembangunan Daerah
- b. Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah / SIPD (Bangub)
- c. Verifikasi dan Validasi Data PBDT Tahun 2015
- d. SIPD (Bangub)

5. Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik

- a. Pembinaan dan Monitoring Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Internet
- b. Fasilitasi dan Pembinaan Forum Media Tradisional dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
- c. Operasional Pendampingan PPID
- d. Penyiaran Kegiatan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
- e. Konferensi Pers dan Liputan
- f. Peningkatan Kualitas Fungsi Bakohumas
- g. Peningkatan Kapasitas Kehumasan
- h. Sosialisasi Kebijakan Pemkab melalui Media Cetak dan Elektronik
- i. Fasilitasi Penerbitan dan Pengembangan Media Cetak milik Pemerintah
- j. Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemkab
- k. Fasilitasi LPPL

BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DINKOMINFO

A. Pengelolaan Belanja Dinkominfo

1. Target dan Realisasi Belanja

Guna mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2017, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan 5 program utama dengan 25 (dua puluh lima) kegiatan yang didukung anggaran belanja sebesar Rp. 6.838.089.000,- (Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), terdiri dari :

1) **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp. 3.353.626.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.332.635.157,- terdapat selisih sebesar Rp. 20.990.843,- terdiri dari :

1. Gaji pegawai sebesar Rp. 2.531.491.000,- realisasi Rp. 2.516.143.157,- sisa anggaran Rp. 15.347.843,-
2. Tambahan Penghasilan pegawai sebesar Rp. 822.135.000,- realisasi Rp. 816.492.000,- sisa anggaran Rp. 5.643.000,-

6. **Belanja Langsung** sebesar Rp. 3.484.463.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.019.801.719,- atau sebesar 86,66 %, terdapat selisih sebesar Rp. 464.661.281 ,- terdiri dari selisih beberapa kegiatan, yaitu :

- a. Belanja pegawai berupa Honor Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 300.173.000 ,-
- b. Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 2.228.193,230,- terdiri dari :
 1. Belanja Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran sebesar Rp. 111.371.055,-
 2. Belanja Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi sebesar Rp. 194.807.872,-
 3. Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor sebesar Rp. 109.772.550,-
 4. Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor sebesar Rp. 800.000,-

5. Belanja Pendidikan dan Pelatihan Pegawai sebesar Rp. 26.836.498,-
6. Belanja Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD sebesar Rp. 4.202.600,-
7. Belanja Pemeliharaan Website dan Jaringan Internet sebesar Rp. 18.579.665,-
8. Belanja Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Teknologi Informasi Terintegrasi Rp. 363.510.822,-
9. Belanja Teleconference, SMS Center, dan Paperles Office Rp. 59.171.655,-
10. Belanja Pengadaan dan Pemeliharaan Perangkat LPSE Rp.51.672.216,-
11. Belanja Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemkab Rp. 388.794.769,-
12. Belanja Fasilitasi LPPL Rp. 224.188.458,-
13. Belanja Pembinaan dan Monitoring Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Warnet Rp. 12.489.550,-
14. Belanja Fasilitasi dan Pembinaan Forum Media Tradisional dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Rp. 30.854.100,-
15. Belanja Operasional Pendampingan PPID Rp. 5.972.500,-
16. Belanja Penyiaran Kegiatan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Rp. 1.000.000,-
17. Belanja Konferensi Pers dan Liputan Rp. 120.815.381,-
18. Belanja Peningkatan Kualitas Fungsi Bakohumas Rp. 27.095.089,-
19. Belanja Peningkatan Kapasitas Kehumasan Rp. 45.037.500,-
20. Belanja Sosialisasi Kebijakan Pemkab melalui Media Cetak dan Elektronik Rp. 157.988.500,-
21. Belanja Fasilitasi Penerbitan dan pengembangan Media Cetak Milik Pemerintah Rp. 95.160.500,-
22. Belanja Penyusunan Data Dasar dan Informasi Pembangunan Daerah Rp. 93.542.950,-

23. Belanja Verifikasi dan Validasi Data PBDT Tahun 2015 Rp. 338.500,-
 24. Belanja SIPD (Bangub) Rp. 25.970.500,-
 25. Belanja Pengadaan dan Pemeliharaan Sandi dan Telekomunikasi Rp. 58.220.000,-
- c. Belanja Modal sebesar Rp. 488.648.539,- terdiri dari :
1. Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Rp. 184.808.600,-
 2. Belanja modal Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Teknologi Informasi Terintegrasi Rp. 115.265.646,-
 3. Belanja modal Teleconference, SMS Center dan Paperless Office Rp. 34.044.793,-
 4. Belanja modal Pengadaan dan Pemeliharaan Perangkat LPSE Rp. 40.634.500,-
 5. Belanja modal Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemkab Rp. 31.000.000,-
 6. Belanja modal Fasilitas LPP Rp. 17.848.500,-
 7. Belanja modal Pembinaan dan Monitoring Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Warnet Rp. 2.300.000,-
 8. Belanja Modal Konferensi Pers dan Liputan Rp. 56.883.500,-
 9. Belanja Modal Pengadaan dan Pemeliharaan Sandi dan Telekomunikasi Rp. 7.780.000,-

Untuk lebih jelasnya kami sajikan dalam tabel penggunaan anggaran belanja Dinkominfo T.A. 2017 sebagai berikut :

**TABEL BELANJA
DINKOMINFO KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2017**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	Selisih	%
Belanja Daerah				
a. Belanja Tidak Langsung	3.353.626.000,-	3.332.635.157,-	20.990.843,-	99,4
Belanja Pegawai :	3.353.626.000,-	3.332.635.157,-	20.990.843,-	99,4
b. Belanja Langsung	3.484.463.000,-	3.017.014.769,-	467.448.231,-	88,66
• Belanja Pegawai	300.173.000,-	300.173.000,-	0,-	100
• Belanja Barang dan Jasa	2.695.641.461,-	2.228.193.230,-	467.448.231	82,6
• Belanja Modal	488.648.539,-	488.648.539,-	0,-	100
•				
Jumlah	6.838.089.000,-	6.349.649.926,-	488.439.074,-	92,85

Lebih rinci mengenai pengelolaan belanja pada Dinkominfo tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinkominfo Tahun anggaran 2017 sebagaimana terlampir.

2. Permasalahan dan Solusi

2.1. Permasalahan :

Dalam pelaksanaan pencapaian tugas dan fungsi dinas Komunikasi dan Informatika, terdapat permasalahan yang digambarkan pada table berikut :

Tabel 2 :
Analisis Gambaran Pelayanan OPD

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan)	
1	2	3	4	5	6
Gambaran pelayanan OPD	Telah tercapai dan perlu penyempurnaan	RPJMD Kab. Purbalingga 2016-2021	Kemampuan Integrasi sistem pelayanan publik	Lembaga maupun institusi pendidikan yang bergerak di bidang TIK	Implementasi SOP belum optimal
Renstra Diskominfo Provinsi Jawa Tengah	Purbalingga telah memiliki ... saluran komunikasi publik	Renstra Diskominfo Provinsi Jawa Tengah	Distribusi Sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat	Kesenjangan Kemampuan TIK Masyarakat	Implementasi SOP belum optimal
Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika	Purbalingga telah memiliki ... aplikasi yang mendukung pelayanan publik.	Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kemampuan Integrasi sistem pelayanan publik	Lembaga maupun institusi pendidikan yang bergerak di bidang TIK	Distribusi Sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat
RTRW Kab. Purbalingga	Penataan struktur sistem jaringan telekomunikasi belum optimal	RTRW Kab. Purbalingga	Pengembangan infrastruktur TIK	Lembaga maupun institusi pendidikan yang bergerak di bidang TIK	Legalitas Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi
KLHS RPJMD Kab. Purbalingga tahun 2016-2021	Monitoring untuk pembatasan terhadap akses informasi berbahaya rutin dilakukan setiap bulan	KLHS RPJMD Kab. Purbalingga tahun 2016-2021	Kewenangan dalam menangani TIK, informatika (telematika), jasa pos dan telekomunikasi	Legalitas Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi	jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK

Dari hasil analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi OPD lima tahun mendatang maka didapatkan sejumlah rumusan isu strategis, sebagaimana yang tersajikan dalam tabel berikut :

Isu Strategis				
No	Dinamika Internasional	Dinamika nasional	Dinamika regional/Lokal	Lain-lain
1	-	Penerapan Fungsi GPR (Government Public Relations)	Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan TIK	Komitmen pimpinan dalam pengembangan TIK
2	-	media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat	Sarana dan prasarana Komunikasi penunjang operasional pemerintah	Kewenangan dalam menangani TIK, informatika (telematika), jasa pos dan telekomunikasi
3	-	sistem pengamanan data dan Jaringan TIK (firewall, fortigate, co-location, ISO)	Penyelenggaraan statistik sektoral	jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK
4	-	jaminan keamanan sistem TIK	Kemampuan Integrasi sistem pelayanan publik	Komposisi PNS dan tenaga OS/THL
5	-	Legalitas Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi	Pengembangan infrastruktur TIK	Distribusi infrastruktur jaringan
6	-	Kesenjangan Kemampuan TIK Masyarakat	Distribusi Sistem aplikasi dalam menerapkan e-government	-
7	-	-	pengelolaan website Pemerintah Kabupaten secara terintegrasi	-
8	-	-	Lembaga maupun institusi pendidikan di Purbalingga yang bergerak di bidang TIK	-
9	-	-	Distribusi Sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat	-
10	-	-	kapasitas sarana dan prasarana komunikasi internal penunjang operasional pemerintah	-

Isu-isu yang teridentifikasi pada tabel diatas saling mempengaruhi satu sama lain. Salah satunya adalah isu strategis tentang partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan TIK tentang bagaimana mensosialisasikan layanan publik yang dimiliki pemerintah kepada masyarakat agar mereka mau memanfaatkannya, diperlukan pengelolaan komunikasi dan informasi kepada khalayak yang berkaitan dengan Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menerapkan Fungsi GPR (Government Public Relations).

Selain bersifat peluang, isu strategis juga dapat menjadi ancaman bila tidak diantisipasi terutama jika potensi ancaman tersebut berasal dari permasalahan internal. Salah satunya adalah permasalahan masih kurangnya jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK. Hal ini dapat diatasi dengan memanfaatkan banyaknya Lembaga maupun institusi pendidikan di Purbalingga yang bergerak di bidang TIK.

Dalam pelaksanaan pengelolaan belanja secara keseluruhan berjalan dengan baik dan lancar hanya saja terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu :

1. Verifikasi dan Validasi PBDT Tahun 2015 : Rp. 257.000.000,-
 Karena kegiatan ini adalah kegiatan Tahun 2015 sehingga tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2017, seharusnya selesai pada tahun anggaran dimaksud.
2. Pembangunan Gedung LPPL Radio Ardilawet : Rp. 855.000.000,-
 Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena Radio Ardilawet sudah dimerger dengan Radio Suara Perwira yang sekarang berubah nama menjadi Radio Gema Soedirman, dimana sudah memiliki gedung.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Dinkominfo Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut :

Visi : Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia.			
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Misi 1 : Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.			
Tahun 2016-2021			
Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik.	Ketersediaan data tidak sesuai dengan klasifikasi data yang diminta aplikasi	Sebagian besar dokumen perencanaan tidak didasarkan pada data yang lengkap, mutakhir, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Melakukan peningkatan kompetensi pengelola SIPD melalui bimtek.
	Tingkat ketersediaan data rendah	Terdapat ketidaksinkronan antar	Menyamakan persepsi

		dokumen perencanaan, penganggaran, dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan	pengelolaan SIPD melalui Rakor pengelola SIPD
	Kurang tersedianya data yang real time/aktual	Data tersebar di masing-masing SKPD/OPD dan kurang terkoordinasi	Pengadaan sarana penunjang pengelolaan Data, Informasi dan Statistik.
	Keterlambatan inputing dan pelaporan data	Adanya perbedaan data antar SKPD/OPD dan antar level pemerintahan	
	Belum lengkap definisi operasional untuk elemen data tertentu, yang menyebabkan multi interpretasi	Terbatasnya sarana penunjang pengelolaan Data, Informasi dan Statistik.	
	Keragaman sumber data utk elemen data yg sama, shg terdapat ketidakpahaman daerah utk memilih sumber data yg lebih valid;		
	Reorganisasi, perubahan nomenklatur dan pemutasian pejabat pengelola/operator.		
	Keterbatasan SDM, fasilitas dan kemampuan jaringan internet di beberapa unit kerja pengelola SIPD Kab/Kota.		
Program Pengelolaan Persandian	Belum ada kebijakan/regulasi tentang penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di Pemkab. Purbalingga.	Merupakan unit kerja baru,	Perumusan kebijakan/regulasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di Pemkab. Purbalingga.

	Belum adanya kompensasi untuk peningkatan Ketahanan Fisik Personil Santel dari efek radiasi.	Kebijakan pimpinan/keterbatasan anggaran	Pemberian suplemen/extra fooding bagi personil santel.
	Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) sandi berkualifikasi ahli sandi yang sangat terbatas dan personil yang ada kurang kompeten.	Keterbatasan ASN, personil yang ada kurang kompeten	Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program Diklat Pembentukan Sandiman, bimtek, seminar dan workshop.
	Kurangnya kesadaran keamanan informasi (security awareness) bagi para pejabat dan pengelola informasi.	Keterbatasan anggaran	Peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar.
	Antar OPD belum ada jaring komunikasi sandi dan belum ada perangkat lunak dan perangkat keras persandian di semua OPD.	Keterbatasan anggaran.	Pengelolaan sumber daya persandian di Pemkab. Purbalingga (sumber daya manusia sandi, materiil sandi dan jaring komunikasi sandi)
	Hampir semua semua OPD/pejabat struktural/pengelola informasi/komponen ASN dilingkungan pemkab. Purbalingga belum memanfaatkan fungsi sandi untuk	Keterbatasan anggaran	Melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi dengan menggunakan persandian yang meliputi aspek kerahasiaan,

	pembuatan, pengiriman, penyimpanan informasi berklasifikasi di luar fungsi sandi belum diamankan.		keutuhan, ketersediaan, keaslian dan/atau nir-sangkal.
	Belum data/informasi tentang Alat Komunikasi yang digunakan oleh OPD dan Para Pejabat Struktural Pemkab. Purbalingga	Keterbatasan anggaran	Menyediakan Daftar Data Alat Komunikasi OPD dan Para Pejabat di lingkungan Pemkab. Purbalingga.
	Belum ada realisasi Pemberian Tunjangan Pengamanan Persandian bagi Personil Sandi yang sesuai dengan peraturan yang ada..	Kebijakan pimpinan/keterbatasan anggaran	Pemberian Tunjangan Pengamanan Persandian bagi Personil Sandi yang sesuai dengan peraturan yang ada..
	Belum memiliki alat kontak penginderaan sehingga belum dapat melaksanakan operasional pengamanan persandian secara mandiri	Keterbatasan anggaran	Bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara melaksanakan operasional pengamanan persandian.
	Belum melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh OPD	Keterbatasan anggaran/Unit kerja baru	Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh OPD.

Misi 6 : Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana wilayahan yang memadai.			
Program Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi	Kesenjangan Kemampuan TIK Masyarakat	Distribusi Sistem aplikasi dalam menerapkan e-government	sistem pengamanan data yang telah mendapatkan ISO

Program Peningkatan pelayanan Informasi Publik	Belum memadainya jumlah tenaga pelayanan informasi publik	Semakin berkembangnya media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat namun belum digunakan secara tepat	pengelolaan komunikasi dan informasi kepada khalayak guna pelaksanaan tugas dan komunikasi

2.2. Solusi

Adapun solusi / langkah yang diambil oleh Dinkominfo terkait kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan adalah untuk Kegiatan Verifikasi dan Validasi PBDT Tahun 2015 sebesar Rp. 257.000.000,- dikembalikan ke Kas Daerah, sedangkan untuk Kegiatan Pembangunan Gedung LPPL Radio Ardilawet sebesar Rp. 855.000.000,- dialihkan untuk kegiatan lain fasilitasi LPPL Radio Gema Soedirman sebesar Rp. 331.900.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 523.100.000,- dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Purbalingga.

BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN DINKOMINFO

A. Urusan Wajib yang dilaksanakan

1. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

1.1. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota, terdapat 2 (dua) jenis pelayanan dasar yang harus di laksanakan, yaitu :

- 1.1.1. Pelaksanaan Desiminasi Informasi nasional, dengan indikator Pelaksanaan Desiminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional dengan indikator : :
- a. Media massa seperti Radio Gema Soedirman, dengan target menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga (18 Kecamatan), terpenuhi sehingga tingkat capaian sebesar 100%.
 - b. Media baru website (media online) www.purbalinggakab.go.id, dengan target nasional dilaksanakan setiap hari dan tingkat capaian sebesar 100% (dilaksanakan setiap hari)
 - c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat, dengan target nasional sebanyak 2 kali dalam setahun dan tingkat capaian sebanyak 2 kali atau 100%
 - d. Target SKPD yang memiliki website sebanyak 48 OPD, pada tahun 2017 dan tingkat capaian sebanyak 30 OPD atau 64%.
 - e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho, dengan target nasional sebanyak 12 kali per tahun dan tingkat capaian sebesar 12 kali setahun atau 100%
- 1.1.2. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat, dengan indikator Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi masyarakat di tingkat kecamatan, dengan target nasional sebanyak 11 KIM dan tingkat capaian sebanyak 11 KIM atau 100%,

- 1.1.3. Intensitas updating informasi pada website Pemerintah Daerah dengan target 500 kali dan tingkat capaian sebanyak 527 kali atau 10,4%.
- 1.1.4. Jumlah SIM milik Pemerintah Daerah yang berfungsi dan aktif sebanyak 32 SIM.
- 1.1.5. Jumlah Pelayanan Publik secara online 3 SIM.
- 1.1.6. Cakupan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan yang terpublikasikan dengan target 520 kegiatan dan capaian sebesar 1645 kegiatan atau 316%.
- 1.1.7. Cakupan Kegiatan Penyebaran informasi dan dialog melalui TV dan radio dengan target sebanyak 12 kali setahun dan tingkat capaian sebanyak 11 kali atau 92%.
- 1.1.8. Jumlah Kegiatan Komunikasi Kehumasan antar OPD dan Instansi verikal dengan target sebanyak 2 kali dalam setahun dan tingkat capaian sebanyak 2 kali atau 100%
- 1.1.9. Jumlah Komunikasi dan kerjasama dengan media masa (cetak dan online) dengan target sebanyak 30 kali dalam setahun dan tingkat capaian sebanyak 32 kali atau 107%.

Lebih rinci mengenai capaian standar minimal sebagaimana terlampir

2. Realisasi Program dan Kegiatan :

2.1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah :

- 2.1.1. Kegiatan Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran, target kegiatan dimaksud yaitu tercukupinya honor THL SK. Kepala Dinas, Honor Pengelola Keuangan, dan kebutuhan administrasi kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 247.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.179.471.055,- (72,66%) terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 67.528.945,- serta realisasi fisik sebesar 72,70%
- 2.1.2. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi, target pelaksanaan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah sebanyak 493 kali, dengan alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000,- dan Realisasi Keuangan sebesar Rp.194.807.872,- (97,40%) terdapat kelebihan anggaran sebesar Rp. 5.192.128,- serta realisasi fisik sebesar (97,40%)

2.1.3. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, target pelaksanaan kegiatan dimaksud yaitu terpeliharanya sarana dan prasarana kantor berupa 1 (gedung), gedung, 4 (empat) kendaraan roda empat, 13 (tiga belas) kendaraan roda dua dan peralatan kantor lainnya, bahan bakar minyak dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 174.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.109.772.500,- (63,09%) terdapat kelebihan anggaran sebesar Rp. 64.227.500,- serta realisasi fisik sebesar 63,09%.

2.1.4. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, target dari kegiatan ini adalah berupa pengadaan barang berupa 1 paket gorden, 3 microphone, 2 lemari besi, 2 lemari kayu, 1 finger print, 3 papan dinas, 5 kursi kerja, 5 meja kerja, 2 set meja kursi tamu, 30 kursi lipat, 6 meja rapat, 1 TV, 1 AC, 1 kipas angin, 1 paket tralis, 1 PC, 3 Laptop, 2 printer, dan 1 Handycam dengan alokasi anggaran sebesar Rp.187.800.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 185.608.600,- atau sebesar 98,83 %, dan realisasi fisik sebesar 98,80%

2.1.5. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, target kegiatan dimaksud yaitu terdidiknya 45 (empat puluh lima) pegawai negeri sipil Dinkominfo, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 55.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 26.836.498,- (48,79%) serta realisasi fisik sebanyak 24 orang pegawai mengikuti diklat/bimtek (53,3%)

2.1.6. Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.770.600,- (97,71%), serta realisasi fisik sebesar 100%., yaitu berupa tersusunnya dokumen LKjIP, LKPJ, RENSTRA SKPD, Renja dan LKD masing masing rangkap 5 (lima)

2.2. Program Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi

2.2.1. Kegiatan Pemeliharaan Website dan Jaringan Internet, realisasi dari kegiatan dimaksud yaitu terpeliharanya 1 (satu) website purbalingga, 27 subdomaian, 14 yang ada di 30 SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.900.000,- realisasi Rp. 43.589.665,- (94,97 %) dan realisasi fisik sebesar 95%. Permasalahan yang ada yaitu belum maksimalnya update data sub

domain yang ada di masing-masing SKPD, hal ini dikarenakan petugas yang sudah mendapat pelatihan updating sebagian ada yang mutasi. Solusinya yaitu 1. Pendampingan update konten dan berita oleh petugas dari Dinkominfo. 2. Penggantian personil.

- 2.2.2. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Teknologi Informasi Terintegrasi, target dari kegiatan dimaksud yaitu pembayaran Astinet untuk 12 bulan, bandwidth 15 Mbps, 50 Mbps, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 489.576.000,- realisasi Rp. 478.776.468,- (97,79%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 10.799.532,-. Dengan perhitungan awal tahun belum bisa untuk pencairan anggaran mengingat koneksi Astinet untuk LPSE sangat vital jangan sampai terputus, pada kenyataannya penggunaan APBD hanya untuk tahun berjalan. Realisasi fisik sebesar 97,80%
- 2.2.3. Kegiatan Teleconference, SMS Center dan Paperless Office, target dari kegiatan yang dimaksud adalah pembentukan 73 user id dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 110.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 97.556.448,- (88,69%), realisasi fisik sebesar 88,70% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 12.443.552,-
- 2.2.4. Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perangkat LPSE, target dari kegiatan yang dimaksud adalah terpenuhinya operasional LPSE dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 125.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 122.506.716,- (98,01%) realisasi fisik sebesar 98% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.493.284,-

2.3. Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik

- 2.3.1. Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Warnet, target dari kegiatan dimaksud yaitu terbinanya 18 PLIK, dan 60 warnet, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 14.789.550,- (98,60 %) dan realisasi fisik sebesar 98,60%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 210.450,-
- 2.3.2. Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Forum Media Tradisional dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), target dari kegiatan ini adalah pembinaan 11 KIM dan 2 kali pertunjukan rakyat. Dengan Alokasi anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,-

realisasi keuangan Rp. 30.854.100,- (61,71 %) terdapat penghematan sebesar Rp. 19.145.900,- dan realisasi fisik sebesar 61,70% berupa, fasilitasi jamuan/kunjungan tamu studi banding ke Kim Lentera dari Kab. Cilacap, fasilitasi jamuan/kunjungan tamu studi banding dari Kab. Semarang, , fasilitasi kegiatan Lomba FK METRA tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitasi pembentukan Forum KIM;

- 2.3.3. Kegiatan Pendampingan PPID, target dari kegiatan yang dimaksud adalah 60 OPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 10.772.500,- (71,82%) dan realisasi fisik sebesar 71,80% terdiri dari pelaksanaan rapat koordinasi , sosialisasi PPID. Penyusunan daftar informasi publik .PPID Kabupaten Purbalingga berhasil memperoleh penghargaan dari Komisi Informasi sebagai terbaik ke-11 kategori Kabupaten dengan melaksanakan keterbukaan informasi publik.
- 2.3.4. Kegiatan Penyiaran Kegiatan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- realisasi sebesar Rp. 3.400.000,- (13.60%) dengan realisasi fisik sebesar 13,60%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 21.600.000,-
- 2.3.5. Kegiatan Konferensi Pers dan Liputan, target dari kegiatan ini adalah 284 kali kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 348.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 244.523.881,- (70,27%) dengan realisasi fisik sebesar 70,30%, dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 103.476.119,-
- 2.3.6. Kegiatan Peningkatan Kualitas Fungsi Bakohumas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 29.525.089,- (84,36%), realisasi fisik sebesar 84,40% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 5.474.911,-
- 2.3.7. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kehumasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 61.500.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 47.824.500,- (77,76%) realisasi fisik sebesar 77,80%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 13.675.500,-
- 2.3.8. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pemkab melalui Media Cetak dan Elektronik, target dari kegiatan yang dimaksud adalah 92 kali dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 165.582.000,- realisasi

keuangan sebesar Rp. 157.988.500,- (95,41%) realisasi fisik sebesar 95,40%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 7.593.500,-.

2.3.9. Kegiatan Fasilitas Penerbitan dan Pengembangan Media Cetak Milik Pemerintah, target dari kegiatan yang dimaksud adalah 6 edisi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 125.400.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 110.720.500,- (88,29%) realisasi fisik sebesar 88,30%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 14.679.500,-

2.3.10. Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemkab, target dari kegiatan yang di maksud adalah 276 kali dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 426.865.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 419.794.769,- (98,34%) realisasi fisik sebesar 98,30%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 7.070.231,-

2.3.11. Kegiatan Fasilitas LPPL, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 331.900.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 262.619.958,- (79,13%), realisasi fisik sebesar 79,10%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 69.280.042,-

2.4. Program Pengelolaan Persandian

2.4.1. Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sandi dan Telekomunikasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 66.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 66.000.000,- (100%) realisasi fisik sebesar 100%.

2.5. Program Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah

2.5.1. Kegiatan Penyusunan Data Dasar dan Informasi Pembangunan Daerah, target kegiatan yang dimaksud adalah pengadaan 100 Buku Purbalingga Dalam Angka dan 180 buku Kecamatan Dalam Angka dimana masing-masing Kecamatan memperoleh 10 buku Kecamatan Dalam Angka, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.960.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 98.342.950,- (98,38%), realisasi fisik sebesar 98,40% terdapat sisa anggaran sebesar 1.617.050,-

2.5.2. Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data PBDT Tahun 2015, dengan alokasi anggaran Rp. 400.000,- realisasi keuangan Rp. 338.500,- (84,63%), realisasi fisik sebesar 84,63%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 61.500,-

- 2.5.3. Kegiatan SIPD (Bangub), target dari kegiatan yang yang dimaksud adalah 80 buku SIPD SKPD dan 78 SIPD Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 74.580.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 73.610.500,- (98,70%), realisasi fisik sebesar 98,70%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 969.500,-

3. Proses Perencanaan Pembangunan

Dalam mengusulkan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun anggaran 2017 Dinkominfo telah dilaksanakan sesuai dengan pentahapan yaitu melalui musrenbang kecamatan dilanjutkan dengan musrenbang Kabupaten, dan hasil dari musrenbang tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2017.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinkominfo tersebut mengacu kepada RPJMD Kab. Purbalingga 2016 – 2021 dan Rencana Strategis Dinkominfo 2016 – 2021.

4. Permasalahan dan Solusi

- 4.1. Permasalahan yang dihadapi Dinkominfo dalam menjalankan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :
- 4.1.1. Tidak terserapnya anggaran tahun 2017 secara maksimal dikarenakan banyak kegiatan yang dibiayai dari anggaran perubahan sementara waktunya sudah tidak memungkinkan untuk menyelesaikan kegiatan tersebut.
 - 4.1.2. Sarana dan Prasarana Kantor yang masih terbatas, sehingga belum mendukung kinerja pegawai.
- 4.2. Solusi yang dilakukan oleh Dinkominfo dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :
- 4.2.1. Pada tahun 2018 ini kegiatan akan dimulai berjalan pada awal tahun supaya sampai batas waktu yang ditentukan kegiatan dapat selesai pada waktunya.
 - 4.2.2. Pada tahu 2018 ini mengajukan penambahan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana kantor yang belum ada sehingga dapat menunjang kinerja para pegawainya.

5. Prestasi dan Penghargaan

Prestasi dan penghargaan yang diperoleh Dinkominfo tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a) Juara II Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-Metra) se- Jawa Tengah;
- b) Peringkat 11 penerima Penghargaan Badan Publik dalam penerapan keterbukaan informasi public;

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2017, selain dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran, juga dalam rangka mencukupi penyusunan laporan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga tahun 2017 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Demikian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan yang akan datang, sekian dan terimakasih

Purbalingga, Pebruari 2017

**Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purbalingga**



**Tri Gunawan Setyadi, SH.,MH
Pembina Utama Muda
NIP.19690222 199603 1 004**

LAMPIRAN

**DATA DUKUNG IKK
DINKOMINFO KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017**

NO	DATA DUKUNG	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	DPA TAHUN 2017	1	
2	DPA PERUBAHAN TAHUN 2017	1	
3	SOP DINKOMINFO		
4	PERDA yang berhubungan dengan Tupoksi	1	
5	Daftar rincian jabatan eselonering yang	14	
6	terisi		
7	Daftar SOTK DINKOMINFO	V	
8	Daftar rincian jumlah PNS DINKOMINFO	V	
9	Daftar rincian Pejabat yg sudah Diklatpim	V	
10	Daftar jumlah pejabat DINKOMINFO	V	
11	Daftar rincian pejabat yang memenuhi	V	
12	syarat diklatpim	V	
13	Daftar rincian Pejabat DINKOMINFO		
14	Renstra DINKOMINFO	V	
15	Renja/ Program kerja DINKOMINFO	V	
16	RKA Tahun 2017	V	
17	Laporan Keuangan DINKOMINFO	V	
18	Berita Acara pelaksanaan inventarisasi	V	
19	barang	V	
20	Daftar rincian yang menunjukkan nilai aset		
21	yang digunakan		
22	Daftar rincian total nilai aset yang dikuasai DINKOMINFO	V	
23	Foto papan pengumuman		
24	Foto pos pengaduan/ kotak saran		
25	Leflet yang dimiliki DINKOMINFO		

**DAFTAR RINCIAN JABATAN ESELONERING
DI DINKOMINFO KABUPATEN PURBALINGGA
Per 31 Desember 2017**

N O	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL/ TMT	JABATAN	ESELON
1	2	3	4	5
1	Tri Gunawan Setyadi, SH,MH 19690222 199603 1 004	Pembina Utama Muda/IVc 01-04-2015	Kepala Dinkominfo	Esl 2b
2	Udit Bambang Suprpto,SE 19621217 198403 1 005	Pembina Tk I /IVb 01-04-2011	Sekretaris Dinkominfo	Esl 3a
3	Ir Prayitno M.Si 19680629 199003 1 003	Pembina /IVa 01-04-2015	Kabid. Humas dan IKP	Esl 3b
4	Sigit Dwi P,S.Sos.M.Si 19681218 199003 1 006	Pembina /IVa 01-10-2012	Kabid Informatika	Esl 3b
5	Sugiman, SH 19640419 8802 1 001	Pembina / IV a 01-10-2014	Kabid Sandi Statistik dan Telekomunikasi	Esl 3b
6	Budi Santosa,SH.Msi 19700203 199703 1 006	Pembina /IVa 01-10-2014	Kasie Kehumasan	Esl 4a
7	Drs. Sigit Budhidjatmika 19610206 199203 1002	Penata Tk I /IIId 01-04-2002	Kasie Telekomunikasi	Esl 4a
8	Purwanti,SH 19650626 198903 2 009	Penata Tk I /IIId 01-04-2014	Kasie Sandi	Esl 4a
9	Sapto Suhandiyo,S.STP.ST 19780325 199703 1 002	Penata Tk I /IIId 01-10-2015	Kasie Informasi Komunikasi Publik	Esl 4a
10	M. Chusnul Arifin,S.Sos 19640126 1984031 005	Penata Tk. /IIId 01-04-2015	Kasie Statistik	Esl 4a
11	Moh Subhan,S.Kom 19741016 200212 1 001	Penata Tk I /IIId 01-04-2015	Kasie Tata Kelola E-Government	Esl 4a
12	Muhail, ST 19611223 198703 1 003	Penata /IIId 01-04-2012	Kasie Aplikasi dan Infrastruktur	Esl 4a
13	Sri Irawati, SH 19641003 199301 1 002	Pembina /IIId 01-04-2005	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Esl 4a
14	Catur Indinah Rahayuni ,S.SH. 19641126 199303 2 004	Penata Muda Tk. I/ IIId 01-04-2017	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Esl 4a

Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purbalingga



Tri Gunawan Setyadi, SH.,MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19690222 199603 1 004

**DAFTAR RINCIAN PEJABAT YG SUDAH DILKATPIM
DI DINKOMINFO KABUPATEN PURBALINGGA
Per 31 Desember 2017**

N O	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL/ TMT	JABATAN	DIKLATPIM
1	2	3	4	5
1	Tri Gunawan Setyadi, SH,MH 19690222 199603 1 004	Pembina Utama Muda/IVc 01-04-2015	Kepala Dinkominfo	DIKLATPIM II TH 2015
2	Udit Bambang Suprpto,SE 19621217 198403 1 005	Pembina Tk I /IVb 01-04-2011	Sekretaris Dinkominfo	DIKLAT PIM III TH 2006
3	Ir Prayitno M.Si 19680629 199003 1 003	Pembina /IVa 01-04-2015	Kabid. Humas dan IKP	DIKLAT PIM III TH 2013
4	Sigit Dwi P,S.Sos.M.Si 19681218 199003 1 006	Pembina /IVa 01-10-2012	Kabid Informatika	DIKLAT PIM IV IVTH 1998
5	Sugiman, SH 19640419 8802 1 001	Pembina / IV a 01-10-2014	Kabid Sandi Statistik dan Telekomunikasi	DIKLAT PIM IV TH 1997
6	Budi Santosa,SH.Msi 19700203 199703 1 006	Pembina /IVa 01-10-2014	Kasie Kehumasan	DIKLAT PIM IV TH 2000
7	Drs. Sigit Budhidjatmika 19610206 199203 1002	Penata Tk I /IIId 01-04-2002	Kasie Telekomunikasi	DIKLAT PIM IV TH 1998
8	Purwanti,SH 19650626 198903 2 009	Penata Tk I /IIId 01-04-2014	Kasie Sandi	DIKLAT PIM IV TH 2017
9	Sapto Suhandiyo,S.STP.ST 19780325 199703 1 002	Penata Tk I /IIId 01-10-2015	Kasie Informasi Komunikasi Publik	DIKLAT PIM IV TH 2004
10	M. Chusnul Arifin,S.Sos 19640126 1984031 005	Penata Tk. /IIId 01-04-2015	Kasie Statistik	DIKLAT PIM IV TH 1998
11	Moh Subhan,S.Kom 19741016 200212 1 001	Penata Tk I /IIId 01-04-2015	Kasie Tata Kelola E-Government	DIKLAT PIM IV TH 2007
12	Muhail, ST 19611223 198703 1 003	Penata /IIId 01-04-2012	Kasie Aplikasi dan Infrastruktur	belum-
13	Sri Irawati, SH 19641003 199301 1 002	Pembina /IIId 01-04-2005	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	DIKLAT PIM IV TH 2007

**Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purbalingga**



**Tri Gunawan Setyadi, SH.,MH
Pembina Utama Muda
NIP.19690222 199603 1 004**

**DAFTAR RINCIAN JUMLAH PNS DINKOMINFO
KABUPATEN PURBALINGGA
Per 31 Desember 2017**

N O	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL/ TMT	JABATAN	PENDIDIKAN
1	2	3	4	5
1	Tri Gunawan Setyadi, SH,MH 19690222 199603 1 004	Pembina Utama Muda/IVc 01-04-2015	Kepala Dinkominfo	S2
2	Udit Bambang Suprpto,SE 19621217 198403 1 005	Pembina Tk I /IVb 01-04-2011	Sekretaris Dinkominfo	S1
3	Ir Prayitno M.Si 19680629 199003 1 003	Pembina /IVa 01-04-2015	Kabid. Humas dan IKP	S2
4	Sigit Dwi P,S.Sos.M.Si 19681218 199003 1 006	Pembina /IVa 01-10-2012	Kabid Informatika	S2
5	Sugiman, SH 19640419 8802 1 001	Pembina / IV a 01-10-2014	Kabid Sandi Statistik dan Telekomunikasi	S1
6	Budi Santosa,SH.Msi 19700203 199703 1 006	Pembina /IVa 01-10-2014	Kasie Kehumasan	S2
7	Drs. Sigit Budhidjatmika 19610206 199203 1002	Penata Tk I /IIId 01-04-2002	Kasie Telekomunikasi	S1
8	Purwanti,SH 19650626 198903 2 009	Penata Tk I /IIId 01-04-2014	Kasie Sandi	S1
9	Sapto Suhandiyo,S.STP.ST 19780325 199703 1 002	Penata Tk I /IIId 01-10-2015	Kasie Informasi Komunikasi Publik	S1
10	M. Chusnul Arifin,S.Sos 19640126 1984031 005	Penata Tk. /IIId 01-04-2015	Kasie Statistik	S1
11	Moh Subhan,S.Kom 19741016 200212 1 001	Penata Tk I /IIId 01-04-2015	Kasie Tata Kelola E- Government	S1
12	Muhail, ST 19611223 198703 1 003	Penata /IIId 01-04-2012	Kasie Aplikasi dan Infrastruktur	S1
13	Sri Irawati, SH 19641003 199301 1 002	Pembina /IIId 01-04-2005	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	S1
14	Catur Indinah Rahayuni ,S.SH. 19641126 199303 2 004	Penata Muda Tk. I/ IIId 01-04-2017	Kasubag Umum dan Kepegawaian	S1
15	Estining Pamungkas, S.Sos 19801116 200604 2 006	Penata/IIId 01-04-2014	Staf	S1
16	Armono 19600707 198293 1 008	Penata Muda Tk. I/IIId 01.04-2019	Staf	SLTA
17	Supartono 19610326 199309 1 001	Penata Muda Tk. I/IIId 01-04-2008	Staf	SLTA

18	Supriyatno 19611202 198610 1 002	Penata Muda Tk. I/IIIb 01-042005	Staf	SLTA
19	Tulus Pangudi 19610302 19858 1 001	Penata Muda Tk. I/IIIb	Staf	SLTA
20	Hardiyanto 19690619 198903 1 003	Penata Muda Tk. I/IIIb 01-04-2008	Staf	SLTA
21	Pardiyo Tavip Ruwahyono 19661228 198607 1 001	Penata Muda Tk. I/IIIb	Staf	SLTA
22	Agus Sutriyatno 19710824 199203 1 015	Penata Muda Tk. I/IIIb 01-04-2012	Staf	SLTA
23	Nur Hidayanti, S.Ap 19771227 199703 2 001	Penata Muda Tk. I/IIIb	Staf	S1
24	Silas Hayati Natalisa, SE 19760731 201001 2 002	Penata Muda Tk. I/IIIb 01-04-2016	Staf	S1
25	Luky Hidayat, ST 19800112 200903 1 002	Penata Muda Tk. I/IIIb	Staf	S1
26	Eko Wahyu Cahya, S.Kom 19770907 200701 1 008	Penata Muda/IIIa	Staf	S1
27	Sukanto 19630309 198610 1 002	Pengatur Tk./IIId 01-10-2010	Staf	SLTP
28	Nisa Utami 19861027 201001 2 013	Pengatur Tk./IIId	Staf	D3
29	Rinta Dwi Agustina 19660807 200701 2 012	Pengatur/IIc	Staf	SLTA
30	Mujadidudin 19630606 200711 009	Pengatur /IIc	Staf	SLTA
31	Bangun Eni Mulyanti 19680617 200701 2 024	Pengatur /IIc	Staf	SLTA

32	Taufik Haryadi, SH 1978210200701 1 007	Pengatur / Ilc 01-10-2015	Staf	S1
33	Anang Cahyono 19770809 200801 1009	Pengatur /Ilc	Staf	SLTA
34	Nani Puji Wahyuningsih 19740512 201406 2 001	Pengatur / Ilc	Staf	D3
35	Kristianto 19791225 200502 1 004	Pengatur / Ilc	Staf	SLTA
36	Dian Sulistiono 19800531 200901 1 002	Pengatur Tk. I/Ilb 01-10-2014	Staf	SLTA
37	Suhadi 19600411 198603 1 008	Pengatur Muda /Ila 01-04-2002	Staf	SMP
38	Suparman 19700101 200701 1 057	Pengatur /Ila 01-04-2002	Staf	SLTA

**Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purbalingga**



Tri Gunawan Setyadi, SH.,MH
Pembina Utama Muda
NIP.19690222 199603 1 004

**KONDISI PEGAWAI DINKOMINFO
KABUPATEN PURBALINGGA
Per 31 Desember 2017**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL/ TMT	JABATAN	PENDIDIKAN
1	2	3	4	5
1	Tri Gunawan Setyadi ,SH,MH 19690222 199603 1 004	Pembina Utama Muda/IVc 01-04-2015	Kepala Dinkominfo	S2
2	Udit Bambang Suprpto,SE 19621217 198403 1 005	Pembina Tk I /IVb 01-04-2011	Sekretaris Dinkominfo	S1
3	Ir Prayitno M.Si 19680629 199003 1 003	Pembina /IVa 01-04-2015	Kabid. Humas dan IKP	S2
4	Sigit Dwi P,S.Sos.M.Si 19681218 199003 1 006	Pembina /IVa 01-10-2012	Kabid Informatika	S2
5	Sugiman, SH 19640419 8802 1 001	Pembina / IV a 01-10-2014	Kabid Sandi Statistik dan Telekomunikasi	S1
6	Budi Santosa,SH.Msi 19700203 199703 1 006	Pembina /IVa 01-10-2014	Kasie Kehumasan	S2
7	Drs. Sigit Budhidjatmika 19610206 199203 1002	Penata Tk I /IIId 01-04-2002	Kasie Telekomunikasi	S1
8	Purwanti,SH 19650626 198903 2 009	Penata Tk I /IIId 01-04-2014	Kasie Sandi	S1
9	Sapto Suhandiyo,S.STP.ST 19780325 199703 1 002	Penata Tk I /IIId 01-10-2015	Kasie Informasi Komunikasi Publik	S1
10	M. Chusnul Arifin,S.Sos 19640126 1984031 005	Penata Tk. /IIId 01-04-2015	Kasie Statistik	S1
11	Moh Subhan,S.Kom 19741016 200212 1 001	Penata Tk I /IIId 01-04-2015	Kasie Tata Kelola E- Government	S1
12	Muhail, ST 19611223 198703 1 003	Penata /IIIC 01-04-2012	Kasie Aplikasi dan Infrastruktur	S1
13	Sri Irawati, SH 19641003 199301 1 002	Pembina /IIId 01-04-2005	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	S1
14	Catur Indinah Rahayuni ,S.SH. 19641126 199303 2 004	Penata Muda Tk. I/ IIIB 01-04-2017	Kasubag Umum dan Kepegawaian	S1
15	Estining Pamungkas, S.Sos 19801116 200604 2 006	Penata/IIIC 01-04-2014	Staf	S1
16	Armono 19600707 198293 1 008	Penata Muda Tk. I/IIIB 01.04-2019	Staf	SLTA

17	Supartono 19610326 199309 1 001	Penata Muda Tk./IIIb 01-04-2008	Staf	SLTA
18	Supriyatno 19611202 198610 1 002	Penata Muda Tk./IIIb 01-04-2005	Staf	SLTA
19	Tulus Pangudi 19610302 19858 1 001	Penata Muda Tk./IIIb	Staf	SLTA
20	Hardiyanto 19690619 198903 1 003	Penata Muda Tk./IIIb 01-04-2008	Staf	SLTA
21	Pardiyo Tavip Ruwahyono 19661228 198607 1 001	Penata Muda Tk./IIIb		SLTA
22	Agus Sutriyatno 19710824 199203 1 015	Penata Muda Tk./IIIb 01-04-2012	Staf	SLTA
23	Nur Hidayanti, S.Ap 19771227 199703 2 001	Penata Muda Tk./IIIb	Staf	S1
24	Silas Hayati Natalisa, SE 19760731 201001 2 002	Penata Muda Tk./IIIb 01-04-2014	Staf	S1
25	Luky Hidayat, ST 19800112 200903 1 002	Penata Muda Tk./IIIb	Staf	S1
26	Eko Wahyu Cahya, S.Kom 19770907 200701 1 008	Penata Muda /IIla	Staf	S1
27	Sukamto 19630309 198610 1 002	Pengatur Tk./IIId	Staf	SLTP
28	Nisa Utami 19861027 201001 2 013	Pengatur Tk./IIId	Staf	D3
29	Rinta Dwi Agustina 19660807 200701 2 012	Pengatur /IIc	Staf	SLTA
30	Mujadidudin 19630606 200711 009	Pengatur /IIc	Staf	SLTA
31	Bangun Eni Mulyanti 19680617 200701 2024	Pengatur /IIc	Staf	SLTA
32	Taufik Haryadi, SH 1978210200701 1 007	Pengatur / IIc	Staf	SLTA
33	Anang Cahyono 19770809 200801 1009	Pengatur / IIc	Staf	SLTA
34	Nani Puji Wahyuningsih 19740512 201406 2 001	Pengatur / IIc	Staf	D3
35	Kristianto 19791225 200502 1 004	Pengatur / IIc	Staf	SLTA
36	Dian Sulistiono 19800531 200901 1 002	Pengatur / IIc	Staf	SLTA

37	Suhadi 19600411 198603 1 008	Pengatur Muda / Ila	Staf	SMP
38	Suparman 19700101 200701 1 057	Pengatur Muda / Ila	Staf	SLTA

**Kepala Dinas
 Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Purbalingga**



Tri Gunawan Setyadi, SH.,MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19690222 199603 1 004

**DAFTAR RINCIAN PEJABAT YG SUDAH MEMENUHI SYARAT DILKATPIM
DI DINKOMINFO KABUPATEN PURBALINGGA
Per 31 Desember 2017**

N O	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL/ TMT	JABATAN	DIKLATPIM
1	2	3	4	5
1	Catur Indinah Rahayuni ,S.SH. 19641126 199303 2 004	Penata / Illc 01-04-2017	Kasubag Umum dan Kepegawaian	DIKLATPIM IV

**Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purbalingga**



Tri Gunawan Setyadi, SH.,MH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690222 199603 1 004

LAPORAN PELAKSANAAN PURBALINGGA EXPO 2017
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA

Kegiatan Purbalingga Expo Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 17 Desember 2017 di GOR Goentoe Daryono Purbalingga. Kominfo Mengangkat Tema Membangun Negeri Dengan Komunikasi . Adapun Kegiatan yang dilaksanakan selama Expo adalah pembagian Majalah Derap Perwira, Buku Wisata Purbalingga dan Brosur/leaflet anti hoak.

Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purbalingga



Tri Gunawan Setyadi, SH.,MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19690222 199603 1 004